

Hubungan Antara Kaderisasi dan Ideologi dalam Partai Politik: Studi Kasus Aktivitas Internal PDIP

Arfan Fadhillah Danuwidjaja¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

arfan20001@mail.unpad.ac.id

Firman Manan²

Departemen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Firman.Manan@unpad.ac.id

ABSTRACT

Caderization and ideology are important aspects of a political party, especially in the activities of a political party. Ideology primarily plays an important role as the philosophical foundation of a political party. Regeneration can then be seen as fulfilling this goal in the philosophical context of political parties. The relationship between cadre formation and the ideology of a political party then becomes important to explore how the two concepts rub against one another. This article was specifically created with the aim of exploring how ideology influences the regeneration activities of a party, and whether regeneration activities are carried out with the philosophical principles that exist in the ideology of political parties. This is specifically done using qualitative research methods based on data and information directly obtained from case studies of the internal activities of the Indonesian Democratic Party of Struggle. Overall, the results of the research in this article found that the relationship between cadre formation and ideology in political parties is practically centered on efforts to generate good public perceptions of political parties and the ideology espoused by these parties.

Keywords: *Public Perception, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Party Ideology, Party Caderization.*

LATAR BELAKANG

Ideologi adalah seperangkat keyakinan, cita-cita, dan aturan yang mengarahkan perilaku seseorang atau kelompok. Seperangkat gagasan yang memengaruhi tujuan dan program partai politik disebut sebagai ideologinya. Partai politik dengan ideologi yang bertentangan biasanya memiliki sikap yang berbeda dalam isu-isu seperti kebijakan luar negeri, masalah sosial, dan kebijakan ekonomi. Ideologi diperlukan untuk partai politik karena membantu dalam menentukan identitas dan misi mereka (Pasaribu, 2017). Ideologi akan dapat memberi partai seperangkat prinsip dan ide panduan untuk digunakan saat membuat platform dan programnya, dan membantu memisahkan partai dari organisasi politik lainnya.

Partai politik juga dapat menggunakan ideologi untuk mempersatukan anggotanya. Ini dapat membantu menyatukan individu dari berbagai latar belakang dan sudut pandang di bawah satu panji dan menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan. Ideologi juga penting dalam menarik pengikut baru dan mempertahankan yang sudah ada. Banyak orang tertarik pada partai politik yang memiliki keyakinan dan cita-cita yang sama, oleh karena itu mungkin membantu untuk memiliki ideologi yang berbeda dan terdefinisi dengan baik untuk membawa calon pendukung ini (Mietzner, 2013). Ideologi, secara umum, merupakan komponen penting dari partai politik karena berfungsi untuk memperjelas tujuan dan prinsip partai, menyatukan anggotanya, dan menarik pengikut (Pasaribu, 2017).

Sebuah partai politik atau organisasi lain dapat dikaderkan dengan menumbuhkan anggota inti yang berbakat, berdedikasi, dan berkomitmen yang mampu memajukan prinsip dan agenda partai dengan sukses. Kader, atau kelompok inti, sering kali terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen kuat yang telah dipilih dan dilatih untuk mencerminkan pandangan dan tujuan partai. Proses kaderisasi mencakup perekrutan dan pengajaran orang-orang yang memiliki filosofi partai, memberi mereka informasi dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk mempromosikan agenda partai secara efektif, dan menempatkan mereka pada posisi kepemimpinan dalam struktur partai (Ferdian et al, 2020).

Kaderisasi berusaha membentuk kelompok anggota partai yang berbakti dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran partai. Partai politik dan organisasi lain biasanya menggunakan kaderisasi sebagai teknik untuk memperkuat struktur internal mereka dan membangun kelompok inti anggota yang loyal dan berkomitmen. Mungkin juga membantu

untuk memastikan bahwa pandangan dan tujuan partai didukung dan didorong secara konsisten di dalam partai (Ferdian et al, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Novia (2020) mengemukakan bahwa hubungan antara kaderisasi dan ideologi dalam partai politik terlihat langsung dalam upaya peningkatan kualitas dari ideologi partai politik itu sendiri, terutama terkait visi, misi, dan strategi partai politik dalam menangani permasalahan bangsa dan negara. Terserah pemilih untuk memutuskan ideologi partai mana yang paling selaras dengan nilai dan keyakinan mereka sendiri, dan untuk mempertimbangkan rekam jejak masing-masing partai dalam menangani isu-isu yang paling penting bagi mereka. Namun, kaderisasi dalam literatur ini dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ideologi itu sendiri. Partai politik sering kali memiliki keyakinan yang berbeda, yang dapat mempengaruhi pendekatan mereka dalam menyelesaikan masalah sosial. Sebuah partai dengan ideologi konservatif, misalnya, akan menempatkan prioritas yang lebih tinggi untuk melestarikan nilai-nilai dan institusi tradisional daripada partai dengan ideologi liberal mungkin menempatkan hak dan kebebasan individu. Distribusi kekayaan dan penyediaan layanan sosial dapat diberikan prioritas utama oleh partai dengan cita-cita sosialis. Keefektifan ideologi partai politik dalam menangani masalah-masalah masyarakat biasanya bergantung pada berbagai variabel, termasuk tujuan partai, pengetahuan tentang topik yang relevan, dan kapasitas untuk menjalankan programnya.

Prasetya (2011) dalam penelitiannya menuturkan bahwa terdapat pergeseran peran ideologi dalam partai politik, terutama dalam ruang lingkup dan kerangka kerja rekrutmen sebuah partai politik sebagai proses kaderisasi bagi calon anggota dan/atau calon pengurus dari partai politik itu sendiri. Dalam literatur ini dapat dikatakan bahwa kader partai politik yang telah menempuh proses kaderisasi seharusnya dapat menjadi cerminan yang baik dan mampu memberikan relevansi terhadap ideologi dari partai politik yang mereka ikuti. Namun, karena terdapat tren di mana partai politik memprioritaskan kaderisasi untuk menciptakan kader yang khusus dibuat untuk memenangkan kursi pemerintahan di segala tingkat, maka pergeseran peran ideologi dalam kaderisasi kemudian berganti dari peran filosofis sebagai landasan operasional kader tersebut kedepannya menjadi peran perias saja sebagai

pemikiran yang dapat menjadi bagian dari portofolio suatu calon wakil rakyat dalam ajang pemilihan.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering dianggap lebih baik untuk mempelajari fenomena sosial dan politik karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan bernuansa tentang topik seperti dalam artikel ini tentang hubungan antara kaderisasi dan ideologi partai politik. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis mengumpulkan data yang kaya dan terperinci yang dapat memberikan wawasan tentang pengalaman individu dan kelompok yang kompleks dan bernuansa. Ini bisa sangat berguna untuk mempelajari isu-isu sosial dan politik, yang sering kali melibatkan interaksi yang kompleks dan dinamis antara individu dan kelompok dalam lanskap partai politik.

Untuk dapat menemukan data dan informasi yang dapat membantu hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel, penulis akan mengumpulkan data melalui studi kasus kegiatan internal para anggota dan pengurus DPD dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah dilakukan mulai dari tanggal 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) November Tahun 2022 yang lalu. Selain itu, Penulis juga akan menggunakan tinjauan pustaka terkait untuk mendukung hasil studi kasus dalam mengolah informasi dan data menjadi hasil penelitian yang dapat dibahas untuk menemukan tujuan dari penelitian itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 2 November 2022, penulis melakukan studi kasus terkait kegiatan kaderisasi dan kegiatan politik lainnya yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di tingkat DPD. Dari studi kasus ini dapat diketahui bahwa Kaderisasi yang dilakukan oleh DPC, DPD, dan DPP PDIP dilakukan dalam total 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan setiap tahun relatif tergantung dari kebutuhan partai. Kaderisasi dalam tubuh PDIP

berarti bahwa anggota telah dilatih dan telah dianggap mampu merepresentasikan PDIP sebagai pengurus dengan ideologi yang dimiliki oleh partai.

Pada Tanggal 19 - 23 Desember 2022, studi kasus yang dilakukan Penulis memberikan informasi lebih lanjut terhadap ideologi dan landasan filosofis dari PDIP dalam kegiatan politik mereka. Dari studi kasus ini diketahui bahwa setiap Kader dari PDIP harus dapat mengetahui ideologi PDIP yang berpusat pada pemikiran sosialis dan marhaenisme yang dituturkan oleh Bung Karno selaku pendiri dari partai pendahulu PDIP pada zaman kemerdekaan dan Orde Lama. Diketahui juga dari studi kasus ini bahwa PDIP memiliki permasalahan dalam persepsi publik terhadap ideologi sayap kiri partai, dan sering kali hal ini dijadikan komoditas politik oleh Partai Politik lainnya untuk menyerang PDIP dengan memberikan inuendo terkait kemiripan ideologi PDIP dan Partai Komunis Indonesia yang sayangnya berada dalam spektrum filosofis yang sama. Hal ini yang kemudian membuat proses kaderisasi PDIP dilakukan dengan ketat untuk membuat persepsi publik terhadap PDIP, terutama ideologi sosialis dan marhaenisme tidak dapat digunakan sebagai senjata atau komoditas politik untuk menyerang PDIP. Dari studi kasus ini ditemukan fakta bahwa tujuan kaderisasi di PDIP adalah untuk menghasilkan pengurus yang dapat memberikan persepsi publik yang positif, terutama terhadap ideologi dari PDIP itu sendiri.

Partai politik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Antara lain, partai politik biasanya melakukan kegiatan berikut: mengembangkan dan mendorong agenda politiknya. Partai politik sering kali menganut seperangkat ide dan tujuan panduan yang memandu keputusan dan aktivitas mereka (Pabayo et al, 2015). Mereka mungkin menggunakan ideologi ini untuk mengembangkan platform politik yang menjelaskan posisi mereka dalam berbagai isu. Beberapa contoh kegiatan partai politik adalah sebagai berikut (Muchtar, 2016):

- Mengumpulkan dan merekrut sekutu. Partai politik biasanya membangun basis pendukung yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Ini mungkin termasuk mengundang individu untuk bergabung dengan partai, mendirikan cabang dan acara regional, dan berkomunikasi dengan pendukung melalui media sosial dan jalur lainnya.
- Mencalonkan diri untuk jabatan politik. Partai politik biasanya mengajukan kandidat untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik, seperti dalam pemilihan lokal, negara

bagian, atau nasional. Partai dapat memberikan dukungan kepada kandidat tersebut, termasuk pendanaan, materi kampanye, dan dukungan organisasi.

- Advokasi untuk legislasi dan perubahan kebijakan. Partai politik sering bekerja untuk mempromosikan undang-undang dan kebijakan yang sejalan dengan ideologi dan platform mereka. Ini mungkin melibatkan melobi pejabat terpilih, mengorganisir kampanye advokasi, dan melibatkan publik untuk membangun dukungan bagi posisi mereka.
- Menentang partai politik dan kandidat lain. Partai politik juga dapat melakukan kegiatan politik yang ditujukan untuk menentang partai dan kandidat lain yang memiliki keyakinan atau ideologi yang berbeda. Ini mungkin melibatkan kampanye melawan kandidat lawan, melakukan penelitian oposisi, dan terlibat dalam debat dan bentuk wacana politik lainnya.

Secara teori, menurut Novia (2020) Keterkaitan antara kaderisasi dan ideologi dalam partai politik adalah bahwa kaderisasi merupakan proses yang digunakan untuk menciptakan kelompok inti anggota partai yang terampil dan berkomitmen yang dapat berhasil memajukan filosofi dan program partai. Untuk memajukan tujuan partai secara efektif, orang-orang yang setia pada ideologi itu sering direkrut, dilatih, dan kemudian diberikan posisi tanggung jawab dalam struktur partai setelah menerima informasi dan keterampilan yang diperlukan. Kaderisasi dan ideologi kemudian dapat diteorikan karena kedua komponen tersebut sangat penting untuk menguraikan arah dan tujuan partai politik serta membantu menyatukan pendukung dan anggotanya.

Efriza (2019) menuturkan dalam penelitiannya bahwa ideologi dari sebuah partai politik memiliki hubungan langsung dengan persepsi publik terhadap partai politik tersebut. Publik biasanya menganggap ideologi partai politik sebagai sekumpulan ide, nilai, dan keyakinan yang membentuk kebijakan dan tindakan partai. Publik dapat menilai sikap partai politik terhadap berbagai persoalan dengan mempertimbangkan ideologi sebagai penentu agenda dan platform politik partai. Sebuah partai politik konservatif, misalnya, akan dianggap berdedikasi untuk menegakkan nilai-nilai tradisional, menjaga pasar bebas, dan mengurangi ukuran pemerintahan. Partai politik dengan pola pikir liberal, di sisi lain, dapat dianggap peduli untuk mencapai keadilan sosial, melindungi lingkungan, dan memperluas peran

pemerintah. Ideologi partai politik dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitasnya. Misalnya, sebuah partai yang dianggap memiliki filosofi progresif dapat dinilai oleh publik berdasarkan seberapa sukses partai tersebut menganjurkan langkah-langkah progresif seperti peningkatan pendanaan sekolah atau perawatan kesehatan universal. Secara umum, masyarakat umum memandang ideologi partai politik sebagai ide dan nilai dasar partai, dan berfungsi sebagai kerangka untuk mengevaluasi sikap dan kinerja partai (Andriana, 2016).

Persepsi publik ini tentu merupakan hal yang penting dalam kegiatan partai politik itu sendiri. Menurut Muchtar (2016), Partai politik membutuhkan citra publik yang baik untuk memperluas popularitas dan pengaruh. Persepsi publik dapat mempengaruhi kesan masyarakat terhadap partai politik dan pilihan mereka untuk mendukungnya. Sebuah partai politik dengan citra publik yang baik, misalnya, dapat dianggap mampu, dapat diandalkan, dan berhasil. Akibatnya, popularitas dan dukungan partai di kalangan masyarakat umum dapat meningkat. Jika sebuah partai politik memiliki persepsi publik yang buruk, ia dapat dianggap tidak efektif, tidak dapat dipercaya, atau tidak berhubungan dengan kepentingan dan kepentingan publik secara umum. Akibatnya, popularitas dan pengaruh partai bisa menurun. Mempertahankan citra publik yang baik memungkinkan partai politik mengembangkan kebijakannya dan memenangkan pemilihan. Jika sebuah partai dipandang mampu dan sukses, ia memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan dukungan publik dan naik ke kekuasaan politik (Tantono, dkk. 2019). Hal ini memungkinkan partai untuk melaksanakan tujuan-tujuannya dan mencapai tujuannya.

Model kaderisasi modern ini mungkin berguna untuk hubungan masyarakat karena memastikan bahwa ide dan pendapat partai dikomunikasikan dengan tepat kepada publik dan bahwa partai menyajikan pesan yang konsisten dan kohesif kepada publik. Pandangan publik terhadap partai dapat ditingkatkan dengan memiliki kelompok anggota yang berdedikasi dan terlatih yang dapat mendorong cita-cita dan tujuan partai. Ini karena mungkin menunjukkan seberapa terorganisir dan bermakna pesta itu (Wijayanti & Iswandi, 2021). Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan partai dan meningkatkan daya tarik organisasi bagi pendukung potensial.

Selain itu, kaderisasi dapat membantu upaya humas partai dengan memberikan informasi dan keterampilan yang dibutuhkan anggota partai untuk berinteraksi secara efektif

dengan publik. Ini mungkin termasuk pelatihan dalam hubungan media, berbicara di depan umum, dan keterampilan penting lainnya untuk memajukan tujuan dan cita-cita partai secara efektif (Muchtar, 2016). Secara umum, kaderisasi penting untuk hubungan masyarakat karena membantu membentuk kelompok anggota partai yang setia dan efektif yang dapat memajukan keyakinan dan program partai sekaligus meningkatkan citra publik partai dan kampanye hubungan masyarakat. Partai yang memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat melalui kaderisasi yang sesuai dengan ideologi partai akan dapat memberikan dukungan terhadap ideologi partai politik itu sendiri (Rolmi, 2016). Dukungan ini secara langsung akan dapat memberikan jaminan dukungan masyarakat terhadap kegiatan pembuatan kebijakan publik ataupun kegiatan pemerintahan lainnya yang digagas oleh partai politik karena telah sesuai dengan ideologi partai.

Dalam konteks studi kasus terkait aktivitas politik PDIP, dapat diketahui bahwa kaderisasi dan ideologi kemudian memiliki hubungan penting dalam bentuk representasi anggota yang dapat membentuk persepsi publik yang baik terhadap ideologi partai politik itu sendiri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, persepsi publik memainkan peran penting dalam keberhasilan dari sebuah partai politik. Hubungan dari kaderisasi dan ideologi sebuah partai politik kemudian dalam praktisnya mengerucut pada kebutuhan partai politik untuk dapat meraih dukungan melalui persepsi publik. Hal ini tentu tidak secara langsung bertentangan dengan ideologi partai politik yang tidak jarang secara khusus didesain untuk meraih dukungan masyarakat umum. Namun, dapat dikatakan bahwa tidak jarang partai politik menempatkan ideologi dalam kaderisasi sebagai label semata dan kemudian melakukan kegiatan politik yang tidak sesuai dengan ideologi partai politik untuk dapat merubah citra yang buruk terhadap ideologi tersebut di mata publik.

Partai politik harus melakukan kaderisasi untuk mempertahankan ideologi yang kuat dan kohesif. Kaderisasi adalah proses memfokuskan keanggotaan partai di sekitar kelompok inti aktivis yang berkomitmen. Hal ini dimaksudkan agar keyakinan dan nilai-nilai fundamental partai diperkuat di antara para anggotanya, karena kaderisasi sering kali meliputi seleksi dan pelatihan anggota partai berdasarkan ketaatan mereka pada ideologi partai (Ferdian, dkk. 2020). Hal ini dapat membantu partai merasa lebih bersatu dan memiliki tujuan, yang sangat penting untuk keberhasilannya dalam pemilu dan kekuasaan. Selain itu, landasan ideologis

yang kuat dapat membantu sebuah partai menonjol dari para pesaingnya dan menarik serta mempertahankan pendukung (Andriana, 2016).

Realita dan praktis dari hubungan antara kaderisasi dan ideologi ini kemudian memberikan perhatian penting terhadap konsep ideologi dalam sebuah partai itu sendiri. Menurut Efriza (2019), teori politik berpendapat bahwa ketika partai politik tidak berpegang teguh pada cita-citanya sendiri, masalah dapat terjadi. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan di kalangan pendukung partai karena mereka mungkin merasa tertipu atau disesatkan oleh upaya partai tersebut. Hal ini dapat menyebabkan jatuhnya kepercayaan dan dukungan terhadap partai, merusak posisi dan kinerja pemilihannya. Suatu partai mungkin juga lebih rentan terhadap tekanan atau pengaruh dari luar jika ia tidak menganut ideologinya sendiri, yang dapat membatasi kemampuannya untuk mewakili kepentingan pendukungnya dengan baik. Hal ini dapat semakin mengikis dukungan partai dengan memberikan persepsi bahwa itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Terakhir, partai politik harus memegang teguh konsepnya untuk menjaga kepercayaan dan dukungan pendukungnya.

Namun, dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, dapat dikatakan bahwa kepentingan dari ideologi dan secara ekstensi implementasi ideologi dalam proses kaderisasi dilakukan oleh partai politik dalam kebutuhan mereka untuk dapat meraih dukungan dan/atau menghasilkan persepsi publik yang positif. Hal ini secara langsung sesuai dengan penemuan Muchtar (2016) yang menjelaskan bahwa kegiatan partai politik modern saat ini berpusat pada kompetisi atas kursi dan kendali dalam pemerintahan. Salah satu alasan utama mengapa partai politik modern ingin berada dalam pemerintahan adalah ketika partai politik berkuasa, ia dapat menjalankan program dan prinsipnya. Ini mungkin menjadi motivasi besar bagi partai politik karena memungkinkan mereka mewujudkan prinsip-prinsip mereka dan mungkin meningkatkan kehidupan orang-orang yang mereka wakili. Berada dalam kekuasaan juga dapat meningkatkan akses partai ke sumber daya dan pengaruh, yang dapat digunakan untuk mempromosikan tujuan dan sasaran partai. Terakhir, memiliki kursi di lembaga pemerintah dapat meningkatkan visibilitas dan pengaruh partai, yang dapat membantu meningkatkan reputasinya dan memperluas dukungan publik. Semua faktor ini berkontribusi pada keinginan partai politik modern untuk memegang posisi kekuasaan.

KESIMPULAN

Secara teori, hubungan dari kaderisasi dan ideologi dalam sebuah partai politik dapat dilihat dan ditemukan dalam proses implementasi ideologi partai politik dalam kegiatan kaderisasi itu sendiri. Anggota atau calon anggota diharapkan akan dapat memahami ideologi partai politik yang kemudian akan menjadi ideologi mereka dalam ikut serta pada kegiatan-kegiatan politik lainnya dalam junjungan partai politik. Namun, dalam praktisnya, sesuai dari data dan informasi yang ditemukan dalam studi kasus terkait aktivitas internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ditemukan bahwa terdapat perbedaan mendasar dari teori dan praktis hubungan ideologi dan kaderisasi dalam sebuah partai politik. Perbedaan ini dapat dilihat dalam bagaimana partai politik modern seperti yang ditemukan dalam studi kasus di atas lebih berfokus pada persepsi publik terhadap citra partai politik tersebut dan ideologinya dibandingkan terhadap implementasi nilai-nilai dari ideologi itu sendiri. Perbedaan ini dapat diasumsikan sebagai perluasan dari motivasi partai politik modern untuk dapat meraih dukungan masyarakat umum demi mendapatkan bagian dalam pemerintahan. Hubungan antara kaderisasi dan ideologi dalam partai politik kemudian berubah menjadi lebih pragmatis dengan kader yang dianggap sebagai entitas yang dapat mengubah persepsi publik terhadap partai politik dan ideologinya. Kaderisasi kemudian tidak lagi dilakukan untuk dapat memastikan bahwa anggota atau calon anggota memahami ideologi partai politik, namun agar mereka dapat merepresentasikan ideologi partai yang mereka naungi secara baik untuk menciptakan persepsi publik yang baik terhadap partai politik tersebut.

REFERENSI

- Andriana, N. (2016). Arti Penting Ideologi Bagi Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(2), 8.
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38.
- Ferdian, R., Cahyadi, R., Krisbintoro, S., & Indrajat, H. (2020). Model Kaderisasi Partai Politik melalui Sayap Partai. *Wacana Publik*, 14(1), 35-40.

- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS press.
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136-147.
- NOVIA, P. P. (2020). *KADERISASI PARTAI POLITIK DALAM MENGUPAYAKAN KUALITAS IDEOLOGI*. Yogyakarta: STPMD
- Pabayo, R., Kawachi, I., & Muennig, P. (2015). Political Party Affiliation, Political Ideology and Mortality. *J Epidemiol Community Health*, 69(5), 423-431.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51-59.
- Prasetya, I. Y. (2011). Pergeseran peran ideologi dalam partai politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 30-40.
- Romli, L. (2016). Masalah Kelen bagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 21-30.
- Tantono, N. E., Priyowidodo, G., & Vidyarini, T. N. (2019). Citra Partai Solidaritas Indonesia di Publik Milenial Surabaya. *Jurnal e-Komunikasi*, 7(2).
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia. *SASI*, 27(4), 475-491.